

## Implementasi Kebijakan Uji KIR Gratis di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik

Yustanti Aprinda Farhana<sup>1</sup>, Roif Rizaly Ramadhan<sup>2</sup>, Regina Maulidya Putri Purwanto<sup>3</sup>, Shinta Aurellia Maharani<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
21041010240@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRACT

Gresik Regency is the region with the densest transport vehicle traffic in East Java because it is one of the large industrial centers. With this, all loaded vehicles operated on public roads are required to have their vehicles tested periodically and recorded in the KIR book. The Gresik Regency Transportation Service has implemented a free KIR test starting January 2024 and the testing stages are in accordance with the applicable SOP. This research aims to find out how the free KIR test policy has been implemented by the Gresik Regency Transportation Service. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of this research include the implementation of the Free KIR test policy at the Gresik Regency Motor Vehicle Testing UPT using implementation theory from Ripley and Franklin (1986), which includes compliance, smooth implementation of routines and functions and the realization of the desired performance. The results of this research show that the free KIR test policy has been implemented in Gresik Regency, but has not yet shown significant results. This is because people are still reluctant to test their vehicles.

**Keywords:** Gresik regency, vehicles, KIR test

### ABSTRAK

Kabupaten Gresik merupakan wilayah dengan lalu lintas kendaraan angkutan terpadat di Jawa Timur karena menjadi salah satu pusat industri besar. Dengan adanya ini, semua kendaraan bermuatan yang dioperasikan di jalan umum wajib untuk mengujikan kendaraannya secara berkala dan dituangkan dalam buku KIR. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah memberlakukan uji KIR gratis mulai bulan Januari 2024 dan tahapan pengujiannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan uji KIR gratis yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mencakup pada implementasi kebijakan uji KIR Gratis di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik dengan menggunakan teori implementasi dari Ripley dan Franklin (1986), yang meliputi kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi serta terwujudnya kinerja yang dikehendaki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan uji KIR gratis telah terlaksana di Kabupaten Gresik, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih enggan untuk mengujikan kendaraannya.

**Kata kunci:** Kabupaten Gresik, kendaraan, uji KIR

## PENDAHULUAN

Kabupaten Gresik telah berkembang menjadi salah satu pusat industri besar di Jawa Timur, dengan berbagai sektor industri seperti semen, pupuk, dan petrokimia yang menjadi penggerak utama ekonominya (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya aktivitas industri menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan niaga di Gresik. Hal ini menjadikan Gresik sebagai salah satu wilayah dengan lalu lintas kendaraan angkutan terpadat di Jawa Timur, mengingat posisinya yang strategis sebagai penghubung antara kawasan industri dan pelabuhan (Surabaya Post, 2020). Kendaraan angkutan seperti truk, trailer, dan container adalah pemandangan umum di jalan-jalan Gresik. Setiap harinya, ratusan hingga ribuan truk beroperasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi dari dan ke pabrik-pabrik, pelabuhan, serta pusat logistik (Kementerian Perhubungan, 2021).

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai salah satu OPD di Kabupaten Gresik yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan dan pelayanan transportasi kepada masyarakat yang mencakup bidang transportasi, lalu lintas, dan sarana prasarana perhubungan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu tugas pokok dan fungsi Dishub Kabupaten Gresik berdasar pada Pasal 48 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan syarat-syarat teknis kelayakan jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, diproduksi dan disusun di dalam negeri yang akan digunakan wajib melakukan pengujian kendaraan secara berkala.

Dengan demikian, untuk mengoperasikan suatu kendaraan umum seperti angkot, bus, truk, dan kendaraan muatan lainnya wajib untuk mengujikan kendaraannya secara berkala dan dituangkan dalam buku KIR. Pengujian tersebut berguna sebagai pernyataan bahwa kendaraan yang digunakan dinilai layak untuk dioperasikan, dan juga untuk menunjang persyaratan sistem transportasi publik. Pengujian kendaraan ini bernama Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi. Teknis pelaksanaan uji kendaraan bermotor dilakukan secara menyeluruh pada setiap komponen kendaraan, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan jalan kendaraan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah memberlakukan uji KIR gratis mulai bulan Januari 2024. Kebijakan uji KIR gratis diterapkan setelah pemerintah resmi mencabut secara nasional kebijakan retribusi pengujian kendaraan. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023. Kebijakan uji KIR gratis berlaku bagi seluruh kendaraan bermotor yang wajib uji seperti bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan (*trailer*), maupun kereta tempelan. Dengan adanya kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan

peningkatan keamanan serta keselamatan dalam berkendara, sehingga diharapkan juga agar masyarakat dapat lebih tertib dalam mengujikan kendaraannya.

Tahap pelaksanaan uji KIR gratis masih tetap sama dengan uji KIR yang dulu (berbayar). Dalam pengujiannya terdapat beberapa tahapan yang sesuai dengan SOP pengujian kendaraan bermotor, yakni tahap uji emisi gas buang, pengujian bawah komponen kendaraan, uji intensitas lampu utama, uji kincup roda depan, uji rem utama dan parkir, uji keakuratan speedometer, tes kebisingan klakson, serta tes kegelapan kaca depan (ambang batas kegelapan kaca adalah 30%). Pengujian tersebut hanya memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Namun, jika dalam uji teknis tersebut terdapat kendaraan yang tidak lolos dalam salah satu tahap uji teknis, pemilik kendaraan diberikan kesempatan untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Apabila kekurangannya dianggap parah, maka pemilik dapat kembali membawa kendaraannya untuk melanjutkan uji teknis pada hari berikutnya.

Kendaraan yang dinyatakan tidak lolos uji teknis akan diberikan surat tidak lulus yang berisi tentang kekurangan-kekurangan teknis sesuai dengan masing-masing kendaraan. Sebaliknya, jika pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang dinyatakan lulus, maka pemilik kendaraan akan diberikan bukti lulus uji berkala yang terdiri dari *smart card vehicle periodical inspection card* (kartu uji berkala kendaraan bermotor), dan stiker RFID yang akan diberikan hanya satu kali setiap enam kali pengujian secara berkala, serta sertifikat hasil uji berkala yang diberikan setiap kendaraan tersebut melakukan uji KIR. Setelah kendaraan lulus dalam pengujiannya, maka kendaraan tersebut memiliki rentan waktu enam bulan untuk dinyatakan layak beroperasi yang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. Rentan waktu tersebut dipaparkan dalam sertifikat hasil uji berkala pada bagian item uji nomor 5, dapat juga dilihat melalui stiker RFID melalui scan *QR-code* yang tertempel pada bagian tengah atas kaca depan kendaraan.

Masyarakat yang memiliki kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang seharusnya mengujikan kendaraannya setiap 6 bulan sekali. Hanya saja informasi uji KIR gratis ini belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan masih banyak ditemui kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis uji, sehingga masyarakat masih enggan untuk melakukan uji KIR karena memerlukan biaya dan waktu yang lumayan. Dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru yakni tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat, dikarenakan banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR sehingga dapat dikatakan tidak layak untuk beroperasi. Kepadatan lalu lintas di Gresik yang didominasi oleh kendaraan angkutan berat berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama di jalur utama yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan. Banyak kecelakaan di Gresik terjadi karena truk yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik atau muatan berlebih yang membuat kendaraan sulit dikendalikan (Dinas Perhubungan Jawa Timur, 2020).

Proses pelaksanaan implementasi kebijakan uji KIR gratis juga masih menimbulkan beberapa masalah, seperti belum dapat menurunkan angka jumlah kecelakaan. Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah berdasarkan data dari

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik selama masa pemberlakuan uji KIR gratis, partisipasi masyarakat dalam kesadaran keselamatan lalu lintas melalui pengujian kendaraan justru turun dengan adanya kebijakan uji KIR gratis.

Dengan demikian, dari adanya permasalahan pada latar belakang tersebut menarik penulis melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah terkait bagaimana implementasi Kebijakan uji KIR secara gratis di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan uji KIR gratis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada alur dan ketentuan dari kebijakan uji KIR gratis di Kabupaten Gresik dan menggunakan teori implementasi dari Ripley dan Franklin (1986), yang melihat dari tiga faktor keberhasilan dalam implementasinya, seperti tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas dan fungsi serta terwujudnya kinerja yang dikehendaki. Lokasi penelitian ini di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Gresik. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf penguji KIR di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Gresik dan data sekunder, yang mencakup dokumen, laporan dan arsip yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Implementasi Kebijakan Uji Kir Gratis Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik, diperoleh hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986) yang terdiri dari 3 faktor keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu tingkat kepatuhan yang dijalankan dari bawahan kepada atasan, adanya kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah, dan terwujudnya kinerja yang dikehendaki. Berikut hasil dan pembahasan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

### **1. Tingkat Kepatuhan yang Dijalankan dari Bawahan Kepada Atasan**

Implementasi kebijakan uji KIR gratis pada UPT PKB Kabupaten Gresik sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang retribusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang telah membebaskan biaya retribusi kendaraan wajib uji. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), proses pelayanan uji kendaraan dimulai dengan pengajuan permohonan uji di loket pendaftaran, disertai dengan dokumen persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, petugas administrasi akan memverifikasi dokumen pengajuan yang meliputi STNK, buku atau kartu uji, serta sertifikat uji. Setelah semua data sesuai dan

diinput ke dalam SIM PKB, pemohon akan menerima formulir lembar hasil pemeriksaan (FLHPK). Kemudian kendaraan dibawa masuk ke dalam gedung uji.

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses awal mula munculnya gagasan kebijakan uji KIR gratis adalah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pengujian kendaraan dan meminimalisir tindakan calo. Dengan adanya hal tersebut, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi lembaga, kemampuan anggaran dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 2. Adanya Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Hambatan

Implementasi kebijakan yang sukses ditandai dengan lancarnya suatu aktivitas rutin fungsi dan tidak ada permasalahan yang dialami. Aktivitas rutin fungsi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Lancarnya pelaksanaan rutinitas dan fungsi yaitu tanpa adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan sebagai persyaratan teknis dan layak jalan. Terdapat dua tahapan uji kendaraan, yaitu:

### 1) Pendaftaran Uji

Tahap pendaftaran uji kendaraan di UPT PKB Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIAP KIR. Bagi masyarakat yang terkendala di pendaftaran *online*, bisa melakukan pendaftaran secara online di UPT PKB Kabupaten Gresik dengan membawa persyaratan, seperti fotocopy STNK, KTP pemilik (jika atas nama perusahaan, maka harus melampirkan domisili perusahaannya) dan apabila diwakilkan, maka harus disertai dengan surat kuasa dari pemilik kendaraan.

### 2) Pengujian Teknis

Tahap pengujian teknis dilakukan jika pemilik kendaraan telah berhasil mendapatkan nomor antrian saat pendaftaran uji. Pada tahap ini, jika semua berjalan dengan lancar maka hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Tahap pengujian teknis meliputi delapan tahap, yaitu:

1. Uji emisi gas buang
2. Pengujian bawah komponen kendaraan
3. Uji intensitas lampu utama
4. Uji kincup roda depan
5. Uji rem utama dan parkir
6. Uji spidometer (keakuratan)
7. Tes kebisingan klakson
8. Tes kegelapan kaca depan (ambang batas 30%)

Jika dalam pengujian terdapat kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena adanya standar kendaraan yang tidak terpenuhi, maka pemilik kendaraan

tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya dan diberi kesempatan untuk kembali diuji ulang setelah selesai diperbaiki. Setelah kendaraan dinyatakan lulus uji maka akan mendapatkan sertifikat uji, kartu elektronik, dan stiker RFID.

Dalam pelaksanaan uji KIR ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan meluncurkan aplikasi SIAP KIR agar masyarakat yang akan melakukan uji KIR dapat mendaftar secara *online*. Namun, dalam penggunaan aplikasi ini seringkali terjadi hambatan yaitu ketika terjadi *trouble* pada aplikasinya. Jika terjadi hal tersebut, maka masyarakat yang akan mendaftar harus melakukan pendaftaran uji KIR secara manual dengan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Selain itu, hambatan juga terjadi ketika ada pemadaman listrik. Hal ini sangat menghambat jalannya pekerjaan karena semua peralatan yang digunakan dalam uji KIR menggunakan listrik. Namun, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah menyediakan genset untuk menghindari hambatan tersebut. Adanya genset tersebut menjadikan pekerjaan uji KIR tetap dapat dijalankan seperti biasa meskipun ada pemadaman listrik.

### 3. Terwujudnya Kinerja yang Dikehendaki

Tercapainya suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui kinerja dan dampak yang diharapkan atau dari tujuan kebijakan tersebut. Dalam teori menurut Ripley dan Franklin terdapat dua bagian dari keberhasilan implementasi, yaitu terwujudnya kinerja kebijakan yang lebih mengacu pada pencapaian hasil implementasi dalam kurun waktu yang singkat, dan terwujudnya dampak kebijakan lebih mengarah pada pencapaian hasil pelaksanaan kebijakan dalam kurun waktu yang lebih panjang.

Dalam aspek terwujudnya kinerja pada kebijakan uji KIR gratis yang diimplementasikan oleh UPT PKB Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memperluas jangkauan kendaraan yang melakukan uji KIR. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dalam melakukan uji KIR pada kendaraan yang dimilikinya. Sebelumnya banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan uji KIR kendaraannya, karena membutuhkan biaya yang terbilang cukup lumayan apabila kendaraan tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan uji sehingga pemilik kendaraan wajib untuk membenahi kendaraan tersebut di bengkel agar lolos uji. Selain itu, uji KIR juga memerlukan kelonggaran jadwal waktu operasi kendaraan meskipun cakupan waktu untuk uji KIR hanya 15-20 menit saja, karena apabila kendaraan dinyatakan tidak lolos uji maka memerlukan waktu untuk melakukan perbaikan kendaraan.

Sedangkan untuk aspek terwujudnya dampak yang dikehendaki dalam jangka waktu panjang yaitu terciptanya kelayakan kendaraan untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini juga selaras dengan tujuan dari pelaksanaan uji KIR yaitu untuk memastikan kelayakan kendaraan untuk beroperasi di jalan raya. Dengan kelayakan kendaraan untuk beroperasi tersebut maka dapat tercipta ketertiban lalu

lintas di wilayah Kabupaten Gresik, sehingga dapat juga meminimalisir terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak layak uji seperti rem blong.

Namun, setelah dilakukan penelitian, keadaan di lapangan pada UPT PKB Kabupaten Gresik setelah diimplementasikan kebijakan uji KIR gratis tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan uji KIR mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan tersebut biasanya setiap harinya ada sekitar 150 kendaraan dan sampai pada bulan oktober hanya terdapat rata-rata 100 kendaraan saja. Seharusnya, dengan adanya uji KIR gratis ini masyarakat menjadi lebih tertarik untuk melakukan uji KIR kendaraannya karena tidak dipungut biaya sama sekali, tidak seperti pada sebelumnya yang uji KIR harus membayar dengan biaya yang lumayan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan uji KIR gratis di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah terlaksana di Kabupaten Gresik, namun belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih enggan untuk mengujikan kendaraannya, karena mereka beranggapan memerlukan waktu yang lama apabila terdapat kerusakan dan tidak lolos uji serta memerlukan tambahan biaya untuk memperbaiki kendaraannya. Dapat dilihat melalui tiga indikator keberhasilan kebijakan dalam teori implementasi kebijakan menurut Ripley & Franklin (1986), yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan yang Dijalankan dari Bawahan Kepada Atasan, indikator ini ditinjau dari proses awal mula munculnya gagasan kebijakan uji KIR gratis yang kemudian diterapkan dan dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Gresik pada UPT PKB Kabupaten Gresik. Penguji juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP uji KIR dan memahami proses pelaksanaan serta arahan dari atasan.
2. Adanya Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Masalah, pada indikator ini ditinjau dari alur pelayanan serta hambatan yang dihadapi. Alur pelayanan uji KIR telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan baik dari tahap administrasi hingga tahap uji teknis. Hambatan yang dihadapi berkaitan dengan ketika aplikasi SIAP KIR sedang *trouble* atau tidak dapat diakses, dan pemadaman listrik yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan uji KIR.
3. Terwujudnya Kinerja yang Dikehendaki, dalam implementasi kebijakan uji KIR gratis di UPT PKB Kabupaten Gresik, indikator ini masih belum terpenuhi dengan baik. Tujuan yang diharapkan pada kebijakan uji KIR gratis belum terlaksana, hal ini dapat dilihat pada menurunnya jumlah kendaraan untuk melakukan uji KIR yang sebelumnya 150 kendaraan menjadi 100 kendaraan saja per harinya.

Setelah melihat hasil penelitian tersebut terdapat saran dari kami sebagai peneliti. Sebaiknya UPT PKB Kabupaten Gresik melaksanakan operasi gabungan secara rutin. Operasi gabungan tersebut dilakukan agar para pemilik kendaraan dapat patuh dan taat dengan uji KIR kendaraannya sehingga dapat mengurangi risiko

kecelakaan akibat kendaraan tidak layak pakai karena kendaraan tersebut tidak lulus uji KIR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kania, I. (2021). Implementation of the KIR E-Test Program in the Technical Implementation Unit of the Motor Vehicle Testing Service of the Garut Regency Transportation Service. *International Journal of Science and Society*, 3(3), 3.
- Lee, D., & Hess, D. J. (2020). Regulations for on-road testing of connected and automated vehicles: Assessing the potential for global safety harmonization. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 136, 85-98.
- Marwiyah, S., Puspitarini, R., & Rifan, A. R. (2023). Analisis Implementasi E-KIR terhadap Kualitas Pelayanan dan Uji Kelayakan Berkala pada Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1464-1472.
- Noviana, N., & Noor, M. (2021). Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 75-84.
- Safuan, F. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Transportasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 534-546.
- Septianti, F. S., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Program E-Uji KIR di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tandes Kota Surabaya. *Publika*, 7(1).
- Slamet, K. H., Mustofa, A., & Sunarya, A. (2023). Akuntabilitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Berbasis E-Kir Studi Kasus di Dinas Perhubungan Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(3), 633-644.
- Utomo, A. R. (2024). Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *JURNAL BEVINDING*, 1(11), 41-49.